

LAUT UNTUK KESEJAHTERAAN BANGSA

Inggried Chistiansend Purnomo¹

Indonesia sebagai negara maritim pernah mengalami masa kejayaannya, yakni tatkala Patih Gajah Mada berhasil menyatukan seluruh kepulauan di Nusantara menjadi bagian dari kerajaan Majapahit. Bahkan pada masa awal-awal kemerdekaan, semasa Presiden Soekarno, Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekuatan Angkatan Laut yang ditakuti di kawasan Asia.

Setidaknya perlu juga diingat bahwa sekitar 70 persen luas Indonesia adalah lautan. Sayangnya, fakta itu seperti tidak penting, seolah-olah tidak dianggap sebagai suatu persoalan, sehingga keberadaannya seperti diabaikan atau tidak menjadi isu strategis dalam peta pembangunan Indonesia. Sungguh ironis, ketika bangsa lain begitu terpesona dan merasa ikut memiliki atas kekayaan yang tersebar di ribuan pulau Indonesia, bangsa Indonesia seperti kehilangan semangat dan akal untuk mengelolanya.

Bukanlah kebetulan atau sekedar permainan kata (diksi) bahwa wilayah Indonesia dinyatakan sebagai tanah air dalam satu tarikan napas. Dalam sejumlah lagu kebangsaan, tanah air yang dituliskan merujuk pada Indonesia sebagai negara dengan ribuan pulau. Begitu pula dalam berbagai kesempatan, konsep tanah air adalah sesuatu yang dianggap tidak terpisahkan jika dinisbatkan pada Indonesia.

Penguasaan atas laut menjadi faktor penentu dalam percaturan dunia karena secara faktual sebagian besar permukaan bumi adalah lautan. Logikanya secara kuantitatif, siapa yang menguasai bagian terbesar dari bumi, ia pantas disegani dalam percaturan dunia meskipun hanya memiliki daratan yang tidak seberapa. Begitu pula wilayah Indonesia yang lebih dari 2/3-nya adalah laut. Namun, fakta itu tidak membuat Indonesia menadi kekuatan utama maritim di dunia seperti nenek moyang yang mampu memangun kekuatan maritim nusantara. Jika orientasi pembangunan kekuatan Indonesia tidak bertumpu pada kekuatan maritim, Indonesia tidak akan menjadi negara maritim.

Keberadaan wilayah laut Indonesia yang demikian luas seharusnya dapat dijadikan daya jual yang menguntungkan bangsa, setidaknya dari sisi keunggulan komparatif (*comparative advantages* berdasarkan sumber daya yang melimpah sebagai kekuatan tawar), yaitu tanah (sumber daya alam, termasuk di laut dan isinya), buruh (tenaga kerja murah), dan modal. Meski demikian, keunggulan komparatif saja tidak cukup untuk menghadapi perekonomian dunia yang makin kompetitif sehingga keunggulan komparatif kelautan itu secara bertaha ditransformasi menjadi keunggulan kompetitif (*competitive advantages*). Itu artinya kebijakan mengelola laut tidak hanya cukup dengan membangun sektor perikanan, tetapi harus memangun sektor kelautan secara sistmik melalui pengembangan teknologi dan peningkatan mutu sumber daya manusia.

Pada dasarnya, suka tidak suka, mau tidak mau, selamanya bangsa Indonesia tidak akan bisa melepaskan diri dari kenyataan bahwa bangsa ini adalah negara kepulauan, ada atau tidak ada pengakuan Internasional. Secara *de facto*, Indonesia adalah negara dengan ribuan pulau yang bersatu membentuk kesatuan.

Bangsa Indonesia adalah contoh yang menarik meskipun terkesan ironis, bahkan tragis. Akar masalahnya bukan karena tidak ada kebijakan yang mengatur kelautan, tetapi lebih pada cara mengelola. Pada masa kolonial saja kebijakan yang mengatur kelautan sudah ada. Pada era Orde Lama, angkatan laut Indonesia adalah empat besar di Asia. Pada Orde Baru, kebijakan yang dibuat lebih banyak lagi, tetapi hasilnya masih jauh dari harapan. Sedangkan pada Era reformasi, upaya pembenahan, perbaikan, bahkan

¹ Staf Pengajar Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang

perubahan lebih serius dilakukan untuk mengembalikan jati diri dan budaya bangsa Indonesia sebagai bangsa pelaut, meskipun hasilnya belum memuaskan.

Buku ini menarik untuk dibaca karena di dalamnya terdapat fakta-fakta yang tentunya bukan untuk menegasi atau mendelegitimasi pencapaian yang ada. Adanya kesenjangan antara kebijakan dan implementasi mengingatkan semua pihak, tidak hanya pemerintah, bahwa perbaikan di bidang kelautan masih sangat banyak. Dengan begitu, tidak ada pilihan lain, semua *stakeholders* harus bersatu membangun sektor kelautan bukan hanya karena hal itu adalah takdir kita hidup di negara kepulauan, melainkan kelautan menjanjikan potensi besar yang mampu membuka jalan bagi kemamkmuran dan kesejahteraan rakyat.

Judul Buku : Transformasi Politik Kelautan Indonesia untuk Kesejahteraan Rakyat
Penulis : Ir.H.E.Herman Khaeron, Msi
Penerbit : Cidesindo
Tahun terbit : 2012
Tebal : 192 halaman
ISBN : 978-979-638-086-2